

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI**

**ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION AND EFFECTIVENESS OF SOURCES OF LOCAL GOVERNMENT INCOME AND FUND BALANCE TOWARD INCOME AND EXPENDITURE BUDGET IN LOCAL GOVERNMENT AT SUKABUMI CITY**

**W. Adawiyah, I. C. Kusuma**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda

[www.unida.ac.id](http://www.unida.ac.id)

**ABSTRACT**

The aim this research is to analyze the contribution and effectiveness of sources of local government income and Fund Balance toward Income and Expenditure Budget in Local Government of Sukabumi. The research used secondary data and unit of analysis was Report of Income and Expenditure Budget Calculation period 2006-2010. Analysis used in this research was analysis of contribution and effectiveness analysis. The result shows that the income contribution from local government income to the Local Government Budget from 2006 to 2010 average 13.55% annually and fluctuated and less base on the criteria. The Contribution of Fund Balance to the Local Government Budget from 2006 to 2010 average 75.53% annually. Level of effectiveness of local income tax, levies, local wealth management, and other legitimate income in from 2006 to 2010 was very good, when the realization can exceed the set targets and runs fluctuate from year to year. The General Allocation Fund and Special Allocation Fund Sukabumi encounter situations where the targets set in accordance with the actual revenues that is equal to 100% (effective).

**Keywords** : Contributions, effectiveness, sources of Income, Fund Balance, Local Government Sukabumi

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2006-2010. Analisis data yang digunakan adalah analisis kontribusi dan analisis efektivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan PAD terhadap APBD dari tahun 2006 sampai dengan 2010 rata-rata setiap tahunnya 13,55 % dan cenderung berfluktuatif dan termasuk pada kriteria kurang. Kontribusi penerimaan Dana Perimbangan terhadap APBD dari tahun 2006 sampai dengan 2010 rata-rata setiap tahunnya 75,53 %. Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah Kota Sukabumi pada tahun 2006 sampai dengan 2010 menunjukkan hasil yang sangat efektif. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kota Sukabumi mengalami kondisi dimana target yang telah ditetapkan sesuai dengan realisasi penerimaan yaitu sebesar 100 % (efektif).

**Kata Kunci** : Kontribusi, Efektivitas, Sumber-sumber PAD, Dana Perimbangan, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

## PENDAHULUAN

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam pengelolaan kegiatan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengembangkan dan mengeksploitasi seluruh sumber daya yang dimiliki untuk kegiatan pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Pembiayaan. Dalam kegiatan suatu organisasi baik kecil maupun besar apalagi organisasi pemerintah yang sangat luas dan kompleks memerlukan alokasi dana yang cukup memadai. Hal tersebut diperlukan untuk membiayai program dan kegiatan organisasi pemerintah yang berkesinambungan. Pembiayaan yang berkesinambungan tersebut dialokasikan dalam kelompok pendanaan rutin yang terdapat dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), maka pendanaan tersebut merupakan salah satu anggaran dalam APBD untuk melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. APBD itu sendiri merupakan kegiatan pemerintah daerah yang harus dipertanggungjawabkan kepada DPRD.

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Menurut Pasal 157 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa, pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba Badan Usaha Milik Daerah, dan pendapatan lain yang sah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya membangun ekonomi wilayahnya tergantung pada kemampuan aparaturnya untuk dapat memobilisasi potensi yang ada pada masyarakatnya melalui optimalisasi peningkatan PAD. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukuran, salah satunya adalah dengan mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah dan mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2010, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sehingga Pendapatan Asli Daerah Sukabumi mencapai sebesar Rp. 91.472.357.185,-. Akan tetapi, dilihat dari sumber-sumber Dana Perimbangan terdapat ketidaktercapaian antara anggaran dan realisasi pada tahun-tahun tertentu yaitu pada Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kota Sukabumi mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Namun apabila dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Sukabumi selama ini masih relatif kecil yaitu berada dibawah 20 persen setiap tahunnya.

Tujuan Penelitian adalah mengetahui kontribusi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Disamping itu untuk mengetahui tingkat efektivitas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk pendalaman pengetahuan yang dapat diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dan apabila telah bekerja di dalam suatu lembaga tertentu. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparatur pemerintah (khususnya aparatur Pemerintah Daerah Kota Sukabumi) sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi para pengambil keputusan dalam

memperhitungkan tingkat efektivitas dan kontribusi sumber-sumber PAD demi peningkatan pembangunan daerah. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat membuka wacana bagi pembaca tentang pentingnya peran masyarakat untuk mendukung optimalisasi peningkatan PAD dan memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai input bagi penelitian lain yang terkait dengan hasil penelitian ini.

**METODE PENELITIAN**

Objek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa perbandingan, atau penghubungan dengan variabel lain. (Siregar, 2010:107) Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder (*time series*), dimana data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu objek dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan dari objek tersebut. Data yang dianalisa meliputi Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2006-2010.

Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2006-2010 (dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Dana Bagi Hasil		Dana Alokasi Umum		Dana Alokasi Khusus	
	Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
	Anggaran	Realisasi				
2006	43,099	50,467	216,741	216,741	17,270	17,270
2007	26,768	27,482	285,095	285,095	21,715	21,715
2008	25,714	34,914	278,943	278,943	27,248	27,248
2009	57,117	50,250	287,525	287,525	40,089	40,089
2010	49,466	48,577	314,420	314,420	23,090	23,090

Sumber : Laporan Realisasi APBD, Bag. Keuangan DPPKAD diolah 2012

**ANALISIS DATA**

Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan

Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Budiyuwono (1995:160). Rumus yang

digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

$$P_n = \frac{QX}{QY} \times 100\%$$

Keterangan:

$P_n$  = Kontribusi penerimaan Komponen PAD terhadap APBD (Rupiah),

$QY$  = Jumlah penerimaan APBD (Rupiah),

$QX$  = Jumlah Komponen penerimaan PAD (Rupiah),

$n$  = Tahun (periode) tertentu

Untuk menilai besarnya kontribusi penerimaan PAD terhadap APBD dapat diinterpretasikan pada kriteria yang dikeluarkan oleh Litbang Depdagri Fisipol UGM sebagai berikut:

Interprestasi Nilai Kontribusi

Kriteria	Rasio Kontribusi (%)
Sangat Kurang	0,00 – 10,00
Kurang	10,00 – 20,00
Sedang	20,10 – 30,00
Cukup	30,10 – 40,00
Baik	40,10 – 50,00
Sangat Baik	>50,00

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM 1991, Ghazali Syamni, 2009

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Suatu kegiatan, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Rumus pengukuran efektivitas untuk penerimaan sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD

Tahun	Total PAD (Rp)	APBD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2006	43.564.078.599	343.281.793.951	12,69	Kurang
2007	49.464.332.552	441.834.215.360	11,20	Kurang
2008	65.263.021.093	447.715.278.248	14,58	Kurang
2009	66.190.680.359	506.568.226.729	13,07	Kurang
2010	91.472.357.185	565.149.868.771	16,19	Kurang

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Bagian Keuangan DPPKAD 2012

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan}}{\text{Target sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327 tahun 1996 mengategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas seperti dibawah ini:

Efektivitas Keuangan Daerah Otonom	
Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≤60

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, Ghazali Syamni, 2009

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Kontribusi Sumber-sumber PAD terhadap APBD

Melihat dan membandingkan kontribusi PAD dan Dana Perimbangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari waktu ke waktu dalam suatu *series* data dalam beberapa tahun yaitu dari tahun 2006-2010, dengan melihat indeks perkembangannya baik dari segi besaran maupun persentasenya.

Tabel dibawah ini menunjukkan hasil perhitungan kontribusi Sumber-sumber PAD terhadap APBD dalam kurun waktu 5 tahun (2006-2010), diperoleh hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tabel diatas, bahwa kontribusi PAD terhadap APBD dari tahun 2006 sampai dengan 2010 berkisar antara 11,20 % sampai dengan 16,19 % atau dengan rata-rata setiap tahunnya 13,55 %. Kontribusi PAD terhadap APBD dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 cenderung berfluktuatif dan termasuk kriteria kurang, namun pada tahun 2010 kontribusi PAD terhadap APBD mencapai 16,19 %. Jika dilihat secara nominal kontribusi PAD terhadap APBD mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya sebesar Rp. 43.564.078.599,- pada tahun 2006 hingga Rp. 91.472.357.185,- pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Sukabumi berupaya untuk dapat mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dananya sendiri demi pembangunan di daerahnya. Kontribusi PAD terhadap APBD ditentukan dari penerimaan dari beberapa sumber-sumber PAD yaitu kontribusi dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kontribusi dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap APBD dari tahun 2006 sampai dengan 2010 berkisar antara 3,07 % sampai dengan 12,22 % atau dengan rata-rata setiap tahunnya 8,11 %. Dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 persentase kontribusi ini mengalami fluktuasi yaitu dari tahun ke tahunnya. Puncaknya, pada tahun 2008 ke tahun

2009 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 12,22 % dan 3,07 % (-9,15 %). Kondisi ini disebabkan karena adanya pengalihan anggaran dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan RSUD untuk tahun anggaran 2009 ke dalam pos penerimaan lain-lain PAD yang sah. Hal ini sejalan dengan adanya Permendagri No.32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. Sedangkan, kontribusi pendapatan lain-lain PAD yang sah terhadap APBD dari tahun 2006 sampai dengan 2010 berkisar antara 0,75 % sampai dengan 13,07 % dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar 5,44 %. Dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 mengalami kenaikan berturut-turut sebesar 0,75 %, 1,01 %, 2,36 %, 10,00 %, dan 13,07 %. Pada tahun 2008-2009 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 2,36 % - 10,00 % (+7,64%). Kondisi ini sama halnya pada kondisi di atas yaitu karena adanya pengalihan anggaran dan realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan RSUD untuk tahun anggaran 2009 ke dalam pos pendapatan lain-lain PAD yang sah.

**Analisis Kontribusi Dana Perimbangan terhadap APBD**

Tabel dibawah ini menunjukkan hasil perhitungan kontribusi Dana Perimbangan terhadap APBD dalam kurun waktu 5 tahun (2006-2010), diperoleh hasil sebagai berikut:

Kontribusi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap APBD

Tahun	Total Dana Perimbangan (Rp)	APBD (Rp)	Kontribusi(%)
2006	284.478.215.352	343.281.793.951	82,87
2007	334.292.251.204	441.834.215.360	75,66
2008	341.106.451.592	447.715.278.248	76,19
2009	377.865.432.876	506.568.226.729	74,59
2010	386.088.446.657	565.149.868.771	68,32

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Bagian Keuangan DPPKAD 2012

Dari data tabel diatas bahwa kontribusi penerimaan Dana Perimbangan terhadap APBD dari tahun 2006 sampai

dengan 2010 berkisar antara 68,32 % sampai dengan 82,87 % atau dengan rata-rata setiap tahunnya 75,53 %. Hasil ini

menunjukkan kriteria sangat baik dari kontribusi Dana Perimbangan terhadap APBD. Hal tersebut sebenarnya tidak sejalan dengan tujuan otonomi daerah yang tidak mencerminkan kemandirian pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber-sumber penerimaan di daerahnya.

### **Analisis Efektivitas Sumber-sumber PAD**

Efektivitas ini merupakan hubungan antara realisasi penerimaan yang bersumber dari komponen PAD dan Dana Perimbangan terhadap target penerimaan dari instrumen PAD dan Dana Perimbangan yang digunakan untuk menghitung besarnya penerimaan dari komponen-komponen PAD dan Dana Perimbangan sesuai dengan target yang ada. Hasil perhitungan tingkat efektivitas Penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan hasil dimana pencapaian realisasi yang dapat melebihi target yang telah ditetapkan dan berjalan secara fluktuatif dari tahun ke tahunnya.

Hasil perhitungan tingkat efektifitas pajak daerah berkisar antara 104,02 % sampai dengan 128,43% pada tahun 2006-2010 dengan rata-rata 111,94% per tahunnya. Tingkat efektifitas retribusi daerah Kota Sukabumi mengalami penurunan dari tahun 2006 sebesar 106,05 % (sangat efektif) menjadi 103,46 % (sangat efektif) pada tahun 2007. Tingkat efektivitas mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar 105,84 % (sangat efektif) dan 111,43 % (sangat efektif). Namun, di tahun 2010 tingkat efektivitas retribusi daerah mengalami penurunan kembali yang mencapai 105,11 % (sangat efektif). Dengan demikian, tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah berjalan fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Hasil tingkat efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kota Sukabumi mengalami kenaikan dari tahun 2006 sebesar 100,00 % (efektif) menjadi

129,48 % (sangat efektif) pada tahun 2007. Pada tahun 2008 pencapaian tingkat efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan sebesar 100,00 % (efektif). Sementara itu, di tahun 2009 tingkat efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak mengalami baik kenaikan maupun penurunan yaitu 100,00% (efektif). Pencapaian tingkat efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 100,69 % (sangat efektif). Untuk tingkat efektivitas lain-lain PAD yang sah Kota Sukabumi berkisar antara 103,37% sampai dengan 527,75% atau dengan rata-rata setiap tahunnya 281,02% dan mengalami kenaikan dari tahun 2006 sebesar 175,29 % (sangat efektif) menjadi 527,75 % (sangat efektif) pada tahun 2007. Tingkat efektivitas mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 sebesar 486,43 % (sangat efektif), 103,37 % (sangat efektif) dan 112,24 % (sangat efektif). Dengan demikian, tingkat efektivitas penerimaan lain-lain PAD yang sah berjalan fluktuatif dari tahun ke tahunnya.

### **Analisis Efektivitas Dana Perimbangan**

Hasil tingkat efektivitas Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Sukabumi berkisar antara 87,98% sampai dengan 135,78% atau rata-rata 108,34% per tahunnya. Hasil ini mengalami penurunan dari tahun 2006 sebesar 117,09 % (sangat efektif) menjadi 102,67 % (sangat efektif) pada tahun 2007. Pada tahun 2008 tingkat efektivitas Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 135,78 % (sangat efektif). Sementara, untuk tahun 2009-2010 mengalami penurunan kembali sebesar 87,98 % (cukup efektif) dan 98,20 % (efektif). Hasil tingkat efektivitas Dana Alokasi Umum Kota Sukabumi mengalami kondisi dimana target yang telah ditetapkan sesuai dengan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum yaitu

sebesar 100 % pada tahun anggaran 2006 sampai dengan 2010. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Dana Alokasi Khusus kota Sukabumi telah efektif untuk mengalokasikan dananya dalam tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan mendanai kebutuhan daerahnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi serta dalam peningkatan pelayanan dan kesajahteraan masyarakat yang semakin baik. Begitu pula dengan hasil efektivitas Dana Alokasi Khusus Kota Sukabumi mengalami kondisi dimana target yang telah ditetapkan sesuai dengan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus yaitu sebesar 100 % pada tahun anggaran 2006 sampai dengan 2010. Dilihat dari penerimaan Dana Alokasi Khusus Kota Sukabumi mengalami peningkatan jumlah target dan realisasi penerimaannya sebesar Rp. 17.270.000.000,- sampai dengan Rp. 40.089.000.000,- dari tahun 2006-2009. Namun, pada tahun 2010 terjadi penurunan target dan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 23.090.700.000,-. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Dana Alokasi Khusus kota Sukabumi telah efektif untuk mengalokasikan dananya dalam mendanai kegiatan khususnya, seperti Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Dan Peningkatan Jaringan Infrastruktur Kota. Salah satunya adalah Penuntasan Jalan Lingkar Selatan Kota Sukabumi.

## KESIMPULAN

1. Kontribusi penerimaan PAD terhadap APBD dari tahun 2006 sampai dengan 2010 berkisar antara 11,20 % sampai dengan 16,19 % atau dengan rata-rata setiap tahunnya 13,55 %. Kontribusi PAD terhadap APBD dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan hasil yang cenderung berfluktuatif dan termasuk pada kriteria kurang. Sumbangan kontribusi penerimaan PAD ini bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Kontribusi penerimaan Dana Perimbangan terhadap APBD dari tahun 2006 sampai dengan 2010 berkisar antara 68,32 % sampai dengan 82,87% atau dengan rata-rata setiap tahunnya 75,53 %. Sumbangan kontribusi penerimaan Dana Perimbangan ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

2. Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah Kota Sukabumi pada tahun 2006 sampai dengan 2010 menunjukkan hasil yang sangat efektif dimana pencapaian realisasi yang dapat melebihi target yang telah ditetapkan dan berjalan secara fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2009 terjadi pengalihan target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan RSUD ke dalam pos lain-lain PAD yang sah. Tingkat efektivitas Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Sukabumi berjalan fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Sementara, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kota Sukabumi mengalami kondisi dimana target yang telah ditetapkan sesuai dengan realisasi penerimaan yaitu sebesar 100 % (efektif) pada tahun anggaran 2006 sampai dengan 2010.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Dianty, Fitri, 2011, Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Guna Darma : Jakarta.
- Bambang, Prakosa K, 2004, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi

- Jawa Tengah dan DIY) Volume 8 Nomor 2, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta.
- Bastian, Indra, 2001, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama, BPFE, UGM, Yogyakarta.
- Budiyuwono, Nugroho, 1995, Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta.
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, 2006-2010, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan APBD Kota Sukabumi tahun 2006-2010. DPPKAD Kota Sukabumi, Sukabumi.
- Fatchanie, Meutia, 2007, Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Hasil Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Sleman, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta.
- Ghazali, Syamni, 2009, Analisis Kontribusi dan Efektifitas Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh : Aceh.
- Hakki, Dio, 2008, Analisis Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Sebelum Dan Pada Masa Otonomi Daerah Di Kota Sukabumi, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Sukabumi : Sukabumi.
- Halim, Abdul, 2002, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- , 2008, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
- Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996 Tentang Efektifitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten Kota, Kementerian Dalam Negeri.
- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddy dan Ayuningtyas Hertianty, 2010, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta.
- Nugraha, LN dan Arvian Triantoro, 2004, Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung Volume 4 Nomor 1, STIA LAN dan UPI : Bandung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
- PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Purwaningdyah, Eneng, 2008, Kajian terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Studi Kasus di Kabupaten Purworejo) Volume 13 Nomor 1, Universitas Terbuka : Jakarta.
- Renyowijoyo, Muindro, 2008, Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba, Edisi Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Riduansyah, Muhammad, 2003, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah : Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, Makara, Sosial Humaniora Volume 7 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia : Jakarta.
- Saragih, J. P. 2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi, Ghalia Indonesia, Indonesia.
- Siahaan, Mariot P, 2005, Pajak dan Retribusi Daerah, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siregar, Amri, 2009, Analisis Tingkat Efektifitas Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara,



- Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara : Medan.
- Siregar, Syofian, 2010, Statistika Deskriptif untuk Penelitian, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, 2005, Pemerintahan Daerah di Indonesia. CV Pustaka Setia, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wijaya, H.A.W. 2007, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- <http://www.karangtangis.blogspot.com/2011/02/proses-penyusunan-apbd-dan-perubahan.html>
- [www.kotasukabumi.go.id](http://www.kotasukabumi.go.id)

